**PEMENUHAN HAK ANAK ASUH PADA PANTI ASUHAN DI PANTI
ASUHAN YATIM AS SIDIQIYAH SIAK**

Oleh :Astri Adillah

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dasrol, S.H., M.H

Alamat : Jln. M. Husni Thamrin VII No. 21, Sail-Pekanbaru

Email : adillah.astri@gmail.com Telepon : 0822-8535-6036

ABSTRACT

The orphanage is designed to be a temporary shelter that provides protection for the rights of children as representatives of parents in meeting mental and social needs so that they have the opportunity to develop themselves until they reach a mature level of maturity, able to act as individuals and citizens in community life, able to live decent and independent and do not depend on others after leaving the orphanage later. The purpose of writing this thesis, namely; First, To Know the Fulfillment of the Rights of Foster Children at the Orphanage in the Orphanage of Sidiqiyah Siak Orphanage, Second, To Know the Obstacles Faced by the Orphanage of Sidiqiyah Siak Orphanage in Fostering the Rights of Foster Children.

This type of research is sociological juridical. Data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques are by questionnaire, interview and literature study. Data analysis uses qualitative data analysis.

The results of this study can be drawn several conclusions, First, the fulfillment of the right to shelter, education, food and drink, medication, and compassion have been given. Second, children's rights have not yet been fulfilled the freedom of children to return home, transportation facilities, possession of passbooks and mobile phones, guarantees and routine health services, work skills training, and written rules / discipline / sanctions for the benefit and good of foster children. Third, the obstacles in fulfilling the rights of foster children are more directed to the lack of interest in foster children in the development of skills, manners and character that is not good, as well as the lack of knowledge of the orphanage regarding guidelines for the fulfillment of the rights of foster children in the orphanage. Author's suggestion, that in the future orphanages pay more attention to fulfilling the rights of foster children and motivate foster children to increase awareness of the importance of skills development activities.

Keywords: Fulfillment of Rights - Foster Children - Orphanages

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 tentang Yayasan dikatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri. (Pasal 11). Sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Agar yayasan tetap menjalankan tugas dan fungsinya maka yayasan boleh mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.¹

Salah satu badan atau lembaga usaha yang didirikan oleh yayasan adalah Panti Asuhan. Panti Asuhan dirancang untuk menjadi tempat perlindungan sementara yang aman bagi anak-anak yang orang tuanya tidak dapat merawat mereka.² Panti

asuhan memiliki tujuan untuk mendidik anak asuh agar menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu belajar untuk menjadi individu tertib, disiplin, serta mematuhi segala norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar di tengah-tengah masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur mengenai Perwalian dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali dari anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan wawancara maupun

¹ Anton Yudi Setianto, *et. al.*, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan & Dokumen*, ForumSahabat, Jakarta: 2008, hlm. 70.

² Sharon Balmer, "From Poverty To Abuse And Back Again: The Failure Of The Legal And Social Services Communities To Protect Foster Children", *Jurnal Westlaw*, Fordham Urban Law Journal, September 2005, hlm. 4.

³ Dwita Ratih Natasha, "Peran Pendidikan Panti Asuhan Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak (Studi Kasus: Panti Asuhan Aisyiyah Semarang)", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016, hlm. 1-2.

observasi prapenelitian penulis pada Kepala Asrama di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak, peralihan kekuasaan dari orang tua kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak tanpa adanya suatu putusan hakim atau pengadilan ataupun akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh panti asuhan.⁴ Maka dengan tidak ada penetapan wali dari putusan hakim atau pengadilan maka panti asuhan tersebut tidaklah menjalankan kekuasaan sebagai wali melainkan hanya sebagai lembaga yang memberikan pelayanan sosial.

Maka menjadi alasan untuk penulis untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK ASUH PADA PANTI ASUHAN DI PANTI ASUHAN YATIM AS SIDIQIYAH SIAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak sudah terpenuhi?
2. Apa kendala yang dihadapi Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak dalam memenuhi hak-hak anak asuh?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak asuh pada panti asuhan di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak.

⁴ Wawancara dengan Bapak Hidayat, Kepala Asrama Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak, Hari Senin, Tanggal 25 Maret 2019, Bertempat di Panti Asuhan Yatim Assidiqiyah Siak.

- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak dalam memenuhi hak-hak anak asuh.

2. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Sebagai masukan dan informasi dalam bidang hukum perdata tentang hak anak asuh pada panti asuhan di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak.

D. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hak Anak

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.⁵ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.⁶ Konvensi hak anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

⁶ Ahmad kamil dan M. Fauzan, *hukum perlindungan dan pengangkatan anak di indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2008, hlm. vii.

perlindungan khusus.⁷ Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.⁸

2. Perlindungan Hukum

Roscou Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang bisa dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan umum;
2. Kepentingan masyarakat;
3. Kepentingan individual.

B. Kerangka Konseptual

1. Anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa, mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak bisa dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai masa kedewasaannya.⁹

⁷ Iman Jauhari, *et. al.*, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Deepublish, Yogyakarta: 2018, hlm. 5.

⁸ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak: Anak Cacat, Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan Anak, Pekerja Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta: 2001, hlm. 4.

⁹ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya*

2. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁰

3. Hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak yang merupakan satu-satunya Panti Asuhan yang ada di Kecamatan

Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2012, hlm. 6.

¹⁰ Pasal 10 *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*.

¹¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Loc.cit*

¹² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pranada Media, Depok: 2018, hlm. 149.

Siak, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Gg. Panti Asuhan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, karena pada Panti Asuhan tersebut terjadi permasalahan yang sesuai dengan penelitian serta dapat memberikan informasi dan data.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Ketua Yayasan As Sidiqiyah Siak, Kepala Asrama dan Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak.

1. Sampel

Dalam penetapan sampel di gunakan metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Ketua Yayasan As Sidiqiyah Siak, Kepala Asrama dan Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Kepala Asrama Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner.
- b. Wawancara.
- c. Kajian kepustakaan.

6. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengelolaan kualitatif, dimana data yang sudah terkumpul tidak berupa angka-angka, data tersebut sukar diukur dengan angka-angka, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.¹³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 1.

(selanjutnya disebut UU Yayasan), menyebutkan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹⁴

2. Pendirian Yayasan

Untuk mendirikan suatu yayasan diperlukan syarat-syarat material yang terdiri dari:

- a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan.
- b. Suatu tujuan.
- c. Suatu organisasi.

3. Organ Yayasan

Yayasan sebagai sebuah badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban, harus memiliki alat kelengkapannya sehingga mampu mengurus dirinya sebagaimana manusia pada umumnya. Alat kelengkapannya atau organnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan yaitu pembina, pengurus, dan pengawas.¹⁵

4. Kegiatan Usaha Yayasan

Pada dasarnya Undang-Undang Yayasan menganut asas nirlaba, dimana dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi bahwa tujuan yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam kegiatannya yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Ini artinya bahwa

ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

1. Pengertian Panti Asuhan

Menurut Gospor Nabor menjelaskan bahwa panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sebagai wujud upaya terjaminnya kesejahteraan sosial. Agar mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mengalami pertumbuhan fisik dan mengembangkan pemikiran hingga ia mencapai tingkat kedewasaan yang matang dan mampu melaksanakan peranan-peranannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

2. Dasar Keberadaan Panti Asuhan

Di Indonesia panti asuhan menjadi sangat dominan karena merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial yang dihadapi oleh Negara yang sedang berkembang seperti kemiskinan penduduk, anak-anak terlantar, korban bencana alam dan lainnya. Dasar hukum yang mengatur keberadaan panti asuhan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baik

¹⁴ Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 74.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 110.

¹⁷ <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/10/pengertian-panti-sosial-asuhan-anak.html>, diakses, tanggal, 2 September 2019.

secara langsung maupun tidak langsung.

3. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan

a. Tujuan Panti Asuhan

Pada dasarnya tujuan panti asuhan tidak dapat terlepas dari tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sebab panti asuhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang pembangunan kesejahteraan sosial itu sendiri.

b. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan merupakan tempat tinggal atau rumah yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan
- 2) Perlindungan
- 3) Pemulihan dan Penyantunan
- 4) Pencegahan

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

a. Secara Sosiologis

Kriteria untuk menentukan pengertian anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu mempunyai kepentingan masing-masing, maka pengertian anak pun menjadi beragam, sesuai dengan perspektif masing-masing bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Akhirnya, sampai sekarang belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia anak, belum ada satu pengertian batas usia anak yang dapat dijadikan acuan bagi semua

bidang ilmu dan lingkungan masyarakat.¹⁸

b. Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.¹⁹

c. Secara Yuridis

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu Undang-Undang dengan yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

2. Pengertian Anak Asuh

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi pengertian bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

¹⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 6.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, *Op.cit*, hlm. 9.

kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²⁰

3. Hak-Hak Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan jaminan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal yang penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.²²

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Sejarah Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh

Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

2. Wilayah Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (*growthtriangle*) Indonesia – Malaysia – Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu

²⁰ Pasal 1 butir (10) *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

²¹ Iman Jauhari, *et. al.*, *Op.cit* , hlm. 4.

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

udara antara 25° — 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

B. Gambaran Umum Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak

1. Nama, Kedudukan dan Legalitas Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak

Panti asuhan ini bernama Panti Asuhan Anak Yatim As Sidiqiyah Siak, untuk selanjutnya disebut Panti Asuhan. Berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo, Gg. Panti Asuhan, Rukun Tetangga 008, Rukun warga 003, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Legalitas Yayasan dibuktikan dengan: Akta Notaris Nomor 08 tanggal 06 November 2014; Keputusan Kementerian Hukum dan HAM; dan Izin Operasional Panti Asuhan Anak Yatim As Sidiqiyah Siak dari Dinas Sosial Kabupaten Siak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Asuh di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak

Panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial anak yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat. Maksud dari pendirian Panti Asuhan adalah untuk membantu dan sekaligus sebagai orang tua pengganti bagi anak yang terlantar maupun yang orang tuanya telah meninggal dunia untuk

memberikan rasa aman secara lahir batin, memberikan kasih sayang, dan memberikan santunan bagi kehidupan mereka. Tujuannya adalah untuk mengantarkan mereka agar menjadi manusia yang dapat menolong dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain dan bermanfaat bagi masyarakat.²³

Menurut Jawad Mughniyah, dalam pemenuhan hak-hak anak asuh pengasuhan anak sama sekali tidak berhubungan dengan perwalian terhadap anak. Pengasuhan semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan memelihara. Namun bukan berarti tidak ada kaitan antara pengasuhan anak dan perwalian.²⁴ Selanjutnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pada panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan menteri sosial pada tahun 2011 tentang standart pengasuhan anak yaitu **Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**. Dijelaskan pada BAB IV Standar Pelayanan Pengasuhan bagian C Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pihak Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak:

1. Bapak Khairul Nizam, selaku Ketua Yayasan As Sidiqiyah Siak.

Pemenuhan terhadap hak anak asuh di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak sudah

²³ Mochtar Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 4.

²⁴ Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Basrie Perss, Jakarta, 1994, hlm. 133.

diupayakan dengan baik dan maksimal. Seperti hak mereka dalam pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sudah dipenuhi dan diupayakan dengan baik. Permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya nilai etika dan moral yang baik pada anak-anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, anak yang bermasalah diberikan nasihat, surat peringatan dan pemanggilan orangtua/kerabat, dan langkah akhirnya adalah dikeluarkan dari panti asuhan. Respon orangtua/kerabat terhadap upaya penyelesaian permasalahan terhadap anak adalah ikut membantu memberi nasihat dan menerima apabila anak terpaksa dipulangkan kepada orangtua/kerabat. Upaya yang dilakukan agar anak-anak dapat hidup mandiri di masyarakat ketika sudah keluar dari panti asuhan adalah membekali anak dengan ilmu dan agama yang bagus, mengasah keterampilan anak dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak.²⁵

2. **Bapak Abdul Rais**, selaku Kepala Asrama Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak.

Hak anak-anak dipanti asuhan diberikan dan dipenuhi dengan baik. Bisa dikatakan bahwa hidup anak-anak jauh lebih sejahtera sejak tinggal di panti asuhan. Permasalahan yang biasa terjadi dipanti asuhan adalah

masalah anak dengan kelakuan yang tidak baik, seperti pacaran dan anak yang suka melawan dan tidak beretika. Untuk permasalahan tersebut anak-anak terpaksa dipulangkan kepada orangtua/kerabatnya karena sudah diberi nasihat dan surat peringatan namun tidak mau berubah. Orangtua/kerabat sudah berusaha membantu memberi nasihat namun tidak ada perubahan sehingga hanya bisa menerima keputusan dari panti asuhan. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk membekali anak agar dapat hidup mandiri dan berguna dimasyarakat, yaitu melatih anak untuk tampil percaya diri, memotivasi anak agar memiliki minat dalam mengikuti kegiatan pengembangan potensi dan keterampilan mereka, mengadakan kegiatan yang bernilai ekonomi dipanti asuhan seperti membuat kerajinan tangan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner diatas jika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bahwa ada standar dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan yang harus berfungsi sebagai pusat layanan bagi anak dan keluarganya sehingga dapat memperkuat pemenuhan hak anak dalam semua aspek hak-hak anak baik kebutuhan dasar, pengasuhan,

²⁵ Wawancara dengan Bapak Khairul Nizam, Ketua Yayasan As Sidiqiyah Siak, Hari Minggu, Tanggal 8 September 2019, Bertempat di Panti Asuhan Yatim Assidiqiyah Siak.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Rais, Kepala Asrama Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak, Hari Minggu, Tanggal 8 September 2019, Bertempat di Panti Asuhan Yatim Assidiqiyah Siak.

perlindungan maupun partisipasi, maka Pemenuhan Hak Anak pada Panti Asuhan di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak belum maksimal dan masih ada beberapa hak anak yang belum terpenuhi seperti pilihan anak untuk menggunakan telepon dan transportasi pribadi, mendapat pemeriksaan kesehatan minimal 6 bulan sekali dan mendapat fasilitas untuk memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan.

Jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum yaitu hukum menjamin agar hak-hak manusia sebagai subjek hukum tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

3. Kendala yang Dihadapi Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak dalam Pemenuhan Hak Anak Asuh

Anak terlantar termasuk anak yang sudah tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua merupakan anak yang memerlukan perhatian karena mereka perlu mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, kasih sayang, bimbingan dan dididik agar mampu menjadi pribadi yang berdaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang telah kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya adalah dimasukkan ke dalam suatu lembaga sosial yaitu panti asuhan agar mereka mendapat pembinaan selayaknya keluarga yang utuh. Anak-anak dengan masalah sosial tersebut perlu mendapat pelayanan sosial dari lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan anak seperti Panti Asuhan.

²⁷ Dodi Haryono, *Loc.cit*

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga non formal yang bergerak dalam pengasuhan anak dimana fungsi Panti Asuhan dalam pendidikan non formal adalah sebagai pelengkap dan penambah. Pelengkap maksudnya pendidikan nonformal dapat mengembangkan program-program yang menampilkan bahan ajar yang tidak dimuat dalam kurikulum pendidikan formal sedangkan penambah maksudnya pendidikan nonformal menyusun program yang dapat mewadahi atau dapat memberi kesempatan tambahan pengalaman belajar dari yang sudah didapat dalam program pendidikan formal.²⁸

Pemenuhan terhadap hak anak asuh diharapkan mampu mengubah kehidupan anak-anak agar hidup lebih layak karena anak telah dibekali ilmu dan keterampilan sehingga percaya diri dalam menghadapi kehidupan setelah anak tidak tinggal di Panti Asuhan.²⁹ Pemenuhan hak terhadap pemeliharaan anak juga mengandung sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan sebagaimana semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak dari orang tua asuhnya. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.³⁰

²⁸ Ishak Abdulhak dan Ugi Suprayogi, *Penelitian Tindakan dalam pendidikan Nonformal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

²⁹ Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, UNY Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 17.

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 204.

Abdul Rais selaku Kepala Asrama Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak yang dalam hal ini juga bertindak sebagai pengasuh menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak asuh terdapat pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam pemeliharaan. Hal ini dikarenakan banyaknya anak yang diasuh sehingga tidak bisa maksimal dalam memberi perhatian, kasih sayang, dan pengawasan terhadap perkembangan anak. Anak-anak didalam panti asuhan juga cenderung tidak memiliki minat dalam pengembangan keterampilan hidup ataupun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tambahan di sekolah maupun di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Sehingga pengasuh mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak agar mau mengikuti kegiatan-kegiatan tambahan dalam pengembangan keterampilan untuk menambah wawasan dan keterampilan mereka agar mereka menjadi seseorang yang berguna dan siap pakai di masyarakat ketika mereka keluar dari panti asuhan.³¹

Dijelaskan didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bahwa panti asuhan harus menetapkan proporsi pengasuh yang seimbang terhadap kebutuhan anak akan pengasuhan dan perkembangan anak, yaitu minimal satu (1) orang pengasuh untuk lima

(5) orang anak. Pengasuh juga harus mendapatkan pelatihan tentang perkembangan anak yang diasuhnya sesuai dengan kategori usia perkembangan, misalnya: usia kanak-kanak (6 sampai 13 tahun), usia remaja (14 sampai di bawah 18 tahun); bakat; kapasitas dan masalah yang dihadapi anak, agar pengasuh dapat memberikan respon yang tepat, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat pemenuhan terhadap semua aspek-aspek hak-hak anak.

Pengasuh perlu untuk memiliki: Pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak, mengenali dan memahami tanda-tanda kekerasan dan solusinya, mendukung dan mendorong perilaku positif, berkomunikasi dan bekerja bersama anak baik secara individual maupun kelompok, mempromosikan dan memungkinkan anak untuk melakukan pilihan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya, melakukan pengawasan dalam bentuk positif terhadap perilaku anak, menghargai setiap martabat anak serta menyediakan kebutuhan fisik anak; Pengalaman bekerja di bidang pelayanan anak, sehat jasmani (tidak memiliki penyakit menular) dan rohani (mental) serta mampu bekerja mendukung Panti Asuhan; Komitmen dan kemauan untuk mengasuh anak yang dinyatakan secara tertulis.³²

Panti asuhan dalam menjalankan tugas perlindungan anak dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaran, eksploitasi dan

³¹ Wawancara dengan Bapak Rais, Kepala Asrama Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak, Hari Minggu, Tanggal 8 September 2019, Bertempat di Panti Asuhan Yatim Assidiqiyah Siak.

³² Lampiran *Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.

kekerasan, juga untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak bahkan diharapkan menjadi pusat pengembangan keterampilan bagi anak-anak melalui bimbingan kepribadian, kreatifitas dan kepercayaan diri. Dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu: Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya; Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³³

Sehingga jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yaitu bahwa hukum baik tertulis maupun tidak tertulis menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Arif Gosita, 1983-53), namun lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Bismar Siregar, 1986-3), dan memberi kemungkinan bagi

mereka untuk berkembang (J.E. Doek, 1984-11).³⁴

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pemenuhan Hak Anak Asuh pada Panti Asuhan di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak bila merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur tentang standar dalam pelaksanaan pengasuhan yang bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak-hak anak masih ditemukan banyak kekurangan dalam pemenuhannya. Dimana masih ada beberapa hak anak yang belum maksimal diberikan dan masih ada yang belum diberikan atau belum terpenuhi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak dalam pemenuhan hak-hak anak asuh adalah kurangnya tenaga pengasuh, sehingga tidak maksimal dalam memberikan pelayanan akan kebutuhan hak-hak anak, dan minimnya minat anak-anak asuh terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yang berguna bagi Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak, pengasuh dan anak asuh, yaitu sebagai berikut:

³³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.* hlm. 15.

1. Kepada Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak agar lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak anak asuh dengan lebih memahami Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sehingga dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur terhadap pemenuhan hak-hak anak asuh pada panti asuhan di Panti Asuhan Yatim As Sidiqiyah Siak. Dan menambah tenaga pengasuh, agar tercipta keseimbangan antara jumlah pengasuh dengan anak asuh.
 2. Kepada pengasuh agar lebih memotivasi anak asuh untuk meningkatkan minat dalam pengembangan keterampilan yang dimiliki anak asuh sebagai bekal kelak di masyarakat.
 3. Kepada anak asuh agar menunjukkan bahwa anak-anak didalam panti asuhan juga mampu untuk berlomba dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, disiplin, mandiri, kreatif untuk modal keterampilan hidup, serta percaya diri dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dan agar memahami pentingnya kegiatan pengembangan keterampilan serta membantu memotivasi anak asuh lainnya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya kegiatan pengembangan keterampilan.
- DAFTAR PUSTAKA**
- A. Buku**
 Abdulhak, Ishak dan Ugi Suprayogi. 2012. *Penelitian Tindakan dalam pendidikan Nonformal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamin, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Pranada Media.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kecana.
- Firdaus dan Fakhry Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi. 2016. *Hukum Perlindungan Hak dan Wanita*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Gofita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Jauhari, Iman, *et. al.* 2018. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di*

- Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mughniah, Jawad. 1994. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Perss.
- Permana, Sudaryat. 2009. *Bikin Perusahaan Itu Gampang*. Yogyakarta: MedPress.
- Print, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2009. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Mataram: RajaGrafindo Persada.
- B. Skripsi**
- Ismina, Tria. 2018. "Penerapan Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Laki-Laki Di Pengadilan Agama Pekanbaru Menurut Kompilasi Hukum islam". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.
- C. Jurnal/Kamus**
- Abdullah, Fuadi. 2013. "Pemenuhan Hak Anak Asuh Oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)". *Jurnal Ilmu Hukum*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol. II. No.1 Agustus.
- Asman, Matthew R. 1993. "The Rights Of A Foster Parent Versus The Biological Parent Who Abandoned The Child: Where Do The Best Interests Of The Child Lie?". *Jurnal Westlaw*. Connecticut Probate Law Journal Association.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- E. Website**
- <http://siakkab.go.id/sejarah-siak/> diakses. tanggal. 6 September 2019.
- <http://siakkab.go.id/geografi-siak/> diakses. tanggal. 6 September 2019.
- <http://siakkab.go.id/moto-lambang-daerah/> diakses. tanggal. 6 September 2019.